

SKRIPSI NURENI AMANDA EDDY (102221010021)

BAB 1-5.pdf

by FAI 28

Submission date: 05-Aug-2026 10:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 3008311471

File name: SKRIPSI_NURENI_AMANDA_EDDY_102221010021_BAB_1-5.pdf (1.68M)

Word count: 15491

Character count: 105748

74

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN
SISTEM PENGEDALIAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
(Studi Emipiris Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir)**

15

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Indragiri*



OLEH:

NURENI AMANDA EDDY
NIM. 102221010021

66

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026**

² BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perluasan sektor publik Indonesia meningkatkan kebutuhan akan akuntabilitas publik dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini disebabkan oleh munculnya delegasi tanggung jawab, pembagian kekuasaan, dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, (Rahayu *et al.*, 2024). Muti'ah *et al.* (2025), menyatakan perluasan sistem pemerintahan berbasis otonomi daerah, menjadikan pengelolaan keuangan daerah sebagai aspek yang sangat penting, dimana penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan akuntabel kepada pemerintah daerah, yang diwujudkan melalui pengaturan, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah membawa konsekuensi berupa peningkatan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan, hal ini menuntut adanya sistem akuntansi sektor publik yang akuntabel, tanggung jawab ini secara spesifik terkait erat dengan pengelolaan keuangan daerah, yang kini menjadi tuntutan umum bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat, menjadikan asas otonomi daerah ini pendorong bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara baik di pusat maupun daerah (Fauzziyah *et al.*, 2025).

4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat, pada intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Asmawanti *et al.*, 2022).

8

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola dana publik yang diperoleh melalui pendapatan daerah serta dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Semakin baik laporan keuangan pemerintah daerah maka akan semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Fauzziyah *et al.*, 2025).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan seseorang dan menerima hasilnya, kewajiban membela dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan pihak yang berwenang merupakan salah satu komponen akuntabilitas. Akuntabilitas lebih dari sekedar pelaporan, hal ini juga mencakup sikap terbuka dan jujur dalam semua tindakan individu atau organisasi, hal ini menyoroti betapa pentingnya transparansi dan kejujuran dalam proses pelaporan dan pengambilan keputusan. Sebagai alat pemantauan, akuntabilitas memastikan bahwa setiap pilihan dan tindakan sejalan dengan norma dan harapan yang ditetapkan oleh mereka yang menduduki posisi tanggung jawab, maka kepercayaan antar pihak yang bertanggungjawab dengan pihak berkepentingan merupakan landasan utama akuntabilitas (Efrina *et al.*, 2024).

11

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggung jawaban yang dilakukan didalam suatu instansi dimana pihak yang berkepentingan harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dia lakukan dan dia kerjakan, sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 11 Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Silooy, 2023).

4

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka harus diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor penyajian laporan keuangan, untuk mewujudkan hal tersebut Adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan (Asmawanti *et al.*, 2022).

1

Laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi unsur kualitasnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yakni relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Lembaga eksternal pemerintah, memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD). Opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menggambarkan tingkat akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Adanya perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kenaikan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, opini audit yang dihasilkan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. (Silooy, 2023).

Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK merupakan puncak tertinggi dari akuntabilitas pengelolaan keuangan pada suatu daerah. Berhasil diakses dari Inhiltoday.com (2025) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 tahun berturut-turut sejak 2016 hingga 2024, menjadi bukti keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mempertahankan predikat tertinggi dalam akuntabilitas keuangan.

Berhasil ditemukan masalah terkait dalam 3 tahun terakhir, yang mengindikasikan bahwa meskipun Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kualitas penyajian laporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal belum sepenuhnya kuat untuk mencegah masalah-masalah ini terjadi, dari situs yang berhasil diakses dari situs goriau.com (2023), adanya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2023 sebesar RP400 miliar menyebabkan banyak pengerjaan proyek yang merasa dirugikan karena ketiadaan kas daerah untuk membayar hasil pekerjaan mereka dan gaji guru ASN dan P3K belum terbayarkan oleh pemerintah daerah.

Tahun berikutnya, LKPD 2024 dimana BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal kepada Kabupaten Indragiri Hilir, penekanan suatu hal berarti ada masalah signifikan yang tidak mempengaruhi kewajaran laporan, tetapi menandakan risiko dalam pengelolaan keuangan sehingga mencerminkan kelemahan pada karakteristik penyajian laporan keuangan serta sistem pengendalian internal, berdasarkan informasi yang berhasil diakses dari situs BPK RI (2025), BPK Riau menjelaskan bahwa BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain penyusunan anggaran, pengendalian belanja, dan manajemen kas yang belum optimal, belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja perangkat daerah yang mengakibatkan ketidakmampuan pemerintah daerah menyelesaikan seluruh realisasi belanja tahun berjalan dan menimbulkan kewajiban jangka pendek berupa utang belanja yang membebani anggaran tahun berikutnya.

Upaya Kabupaten Indragiri Hilir mewujudkan kembali akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya pada tahun 2025, dari data yang berhasil diakses dari Pesisirnews (2025), menggelar rapat evaluasi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun anggaran 2025 hingga bulan Mei 2025, rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dari hasil evaluasi, realisasi fisik pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir hingga Mei 2025 tercatat sebesar 27,19%, sementara realisasi keuangan mencapai 25,04%, meminta seluruh OPD khususnya yang capaian realisasinya masih rendah, agar segera menindaklanjuti dan melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Fenomena ini mempertegas adanya kesenjangan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Secara teoritis, penyajian laporan keuangan yang berkualitas meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Begitu pula, sistem pengendalian internal dapat menjamin keandalan laporan keuangan dan menanamkan mekanisme untuk memastikan semua kegiatan pengelolaan keuangan mematuhi peraturan perundang-undangan yang. Namun, faktanya OPD di Kabupaten Indragiri Hilir memerlukan perbaikan yang fokus pada penyajian keuangan dan membawa implikasi pentingnya sistem pengendalian internal yang lebih akuntabel untuk mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini menegaskan perlunya penelitian untuk mengetahui sejauh mana penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal benar-benar memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyajian laporan keuangan merupakan aspek yang sangat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi penting mengenai kondisi keuangan entitas pelapor dan seluruh transaksinya dalam jangka waktu pencatatan tertentu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa tujuan PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Penyajian informasi yang utuh di dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Asmawanti *et al.*, 2022).

Sejalan dengan Silooy (2023),¹ penyajian laporan keuangan oleh pemerintah merupakan faktor krusial dalam menghasilkan atau menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah diharuskan dan diwajibkan untuk berupaya secara maksimal dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dikarenakan laporan keuangan pemerintah adalah wahana atau media untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan. Saat pemerintah menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan jujur dengan memuat semua informasi keuangan yang terjadi selama satu periode akuntansi maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan dievaluasi semakin baik.

²³ Kebutuhan akan suatu sistem yang dapat mendukung terciptanya akuntabilitas diperkuat oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan bahwa pemerintah daerah berwenang¹⁶ menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah melalui peraturan kepala daerah. Regulasi ini menjadi dasar penting dalam memastikan³³ setiap tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Sistem dan prosedur tersebut merujuk pada sistem pengendalian internal, dalam kerangka regulasi, pemerintah menetapkan adanya sistem pengendalian internal dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, yang harus dilaksanakan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Sistem pengendalian internal tersebut sebagai suatu proses terpadu dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh pegawai dalam rangka memberikan keyakinan yang cukup terhadap pelaksanaan tujuan organisasi, melalui operasi yang efisien dan efektif, keandalan keuangan, pelaporan, perlindungan aset negara dan kepatuhan terhadap aturan dengan hukum. Sistem pengendalian internal berguna untuk memantau jalannya kegiatan pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Amalia, 2022).

Sebagaimana diungkapkan oleh Silooy (2023), sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan akan mampu memberikan jaminan bahwa seluruh rangkaian proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan diawali dari perencanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban, berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan regulasi yang ada, dengan demikian efektif tidaknya penerapan sistem pengendalian internal akan sangat berpengaruh terhadap baiknya akuntabilitas keuangan pemerintah.

Sependapat dengan Rahayu *et al.* (2024), jika sistem ini berfungsi dengan baik diseluruh lembaga, dimulai dengan sistem yang kuat, hal ini dapat menghentikan penipuan, korupsi, dan penyalahgunaan sumber daya. Oleh karena

itu, pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan dipertanggungjawabkan dengan standar tanggung jawab yang lebih tinggi sehingga kesalahan dapat dihindari dan diatasi, serta memastikan setiap proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penelitian Silooy (2023), yang berjudul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan penelitian Muttaqien *et al.* (2024), yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berbeda dengan penelitian Yunus *et al.* (2025), berjudul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan penelitian dari Defana & Rahayu (2023), yang berjudul Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil penelitian ini tidak

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh parsial sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di kabupaten Indragiri Hilir dan ketidak konsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk kembali mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan review dari peneliti sebelumnya yaitu penelitian Silooy (2023) yang berjudul " Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon)". Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya menggunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Ambon sebagai lokasi penelitian, pada tahun 2023 sementara dalam penelitian ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir, dengan mencermati seberapa jauh penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan sistem pengendalian internal yang kuat mewujudkan akutanbilitas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?.
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara Simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris Penyajian Laporan Keuangan dan Pengaruh Pengendalian Internal secara Simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

4 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawabannya ialah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Pengelolaan 4 keuangan pada instansi baik pada pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Asmawanti *et al.*, 2022).

b. Penyajian Laporan Keuangan

1 Penyajian laporan keuangan dilakukan oleh entitas pelapor sebagai sarana untuk memberikan kemudahan dalam menciptakan akuntabilitas publik adalah dengan menyampaikan laporan keuangan secara komprehensif, maka 1 pemerintah daerah dipercaya untuk mengelola sumber daya keuangan yang ada harus bisa memberikan pertanggungjawaban publik melalui penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap, jujur, dan tepat waktu (Silooy, 2023).

c. Sistem Pengendalian Internal

5 Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan (Defana dan Rahayu, 2023).

39

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan untuk mengetahui lebih tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Bagi Akademik

Sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan referensi dan bermanfaat untuk memahami teori sebagai tambahan informasi dalam penelitian mahasiswa dan mahasiswi selanjutnya yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak lain untuk menambah pengetahuan, sumbangan pikiran terutama mengenai penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini memuat tentang urutan-urutan dalam penulisan proposal. Adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan telaah pustaka yang menguraikan telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

TELAAH PUSTAKA

2.1. Telaah Teoritis

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) Jensen & Meckling (1976), menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen untuk bertindak atas namanya, untuk mengelola keuangan negara dan menyajikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Masalah keagenan dapat muncul ketika terdapat asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, yang dapat menyebabkan kesalahan penyajian, penyimpangan, manipulasi informasi, atau ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya.

Syahrudin *et al.* (2025), menjelaskan prinsipal memperkerjakan atau mendelegasikan agen untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh agen untuk kepentingan terbaik prinsipal. Sejalan dengan pendapat Yunus *et al.* (2025), teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal, dimana agen bertanggungjawab melaksanakan tugas yang diberikan oleh prinsipal dengan imbalan tertentu. Konflik keagenan muncul karena perbedaan kepentingan antara keduanya, terutama dalam menghindari risiko. Dalam pemerintahan daerah, teori ini diterapkan sejak otonomi daerah 1999, dimana agen memiliki kewajiban untuk menyejahterakan prinsipal, meskipun sering memunculkan perbedaan preferensi. Oleh karena itu, dibutuhkan penyajian laporan keuangan yang sesuai peraturan dan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan mekanisme sistem pengendalian internal, guna meminimalisasi risiko keagenan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, *agency theory* menjadi landasan penting dalam menelaah bagaimana faktor-faktor internal Organisasi Pemerintah Daerah dapat meraih akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas hingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai hak publik untuk diketahui.

Menurut Zubaidah (2023), bahwa teori keagenan merupakan kontrak di mana satu atau lebih principal yang memberikan kewenangan kepada agen otoritas untuk membuat keputusan. Disini yang dimaksud dengan principal adalah publik atau masyarakat, sedangkan agen adalah seseorang yang memiliki kewenangan dalam instansi atau pemerintah. Teori keagenan dalam organisasi sektor publik menyatakan bahwa pemegang amanah pemerintah sebagai agen bertanggung jawab guna memberikan pertanggungjawaban, menampilkan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh tindakan yang dilakukan oleh mereka. Seperti mengawasi sumber daya keuangan terhadap pihak yang memberi amanah atau rakyat sebagai prinsipalnya yang berhak untuk meminta tanggungjawab tersebut.

Kerangka hubungan prinsipal agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang

memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen (Rahmiyati, 2022).

Sudut pandangan teori diatas menghubungkan antara teori keagenan (Agency Theory) dengan penelitian ini, dimana pemerintah sebagai agen yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal pastinya menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari pengelolaan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana pengelolaan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah.

2.1.2. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan seseorang dan menerima hasilnya, kewajiban membela dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan pihak yang berwenang merupakan salah satu komponen akuntabilitas. Akuntabilitas lebih dari sekedar pelaporan, hal ini juga mencakup sikap terbuka dan jujur dalam semua tindakan individu atau organisasi, hal ini menyoroti betapa pentingnya transparansi dan kejujuran dalam proses pelaporan dan pengambilan keputusan. Sebagai alat pemantauan, akuntabilitas memastikan bahwa setiap pilihan dan tindakan sejalan dengan norma dan harapan yang ditetapkan oleh mereka yang menduduki posisi

tanggung jawab. Untuk membangun hubungan timbal balik dan menjamin bahwa kekuasaan yang diberikan digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan harapan dan standar yang ditetapkan, akuntabilitas mencakup proses dimana orang atau organisasi yang memiliki otorisasi atau kekuasaan harus menjelaskan tindakan mereka kepada pihak yang memberi mereka kekuasaan (Efrina *et al.*, 2024).

Andriana (2024), menjelaskan akuntabilitas merujuk pada kewajiban bagi individu atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada publik atau pemangku kepentingan. Akuntabilitas menciptakan lingkungan dimana pemerintah dan institusi merasa terdorong untuk berinovasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik, karena mereka tahu bahwa setiap keputusan dan kebijakan akan dievaluasi dan diukur dampaknya. Maka dari itu, akuntabilitas yang baik akan memperkuat transparansi, partisipasi, dan efisiensi yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berujung pada peningkatan pembangunan berkelanjutan.

¹ Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban individu atau unit organisasi yang mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta penerapan kebijakan yang dipercayakan kepadanya sehubungan dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui media akuntabilitas. ¹ Akuntabilitas publik berarti kewajiban para pihak pemegang amanah atau mandat (*agent*) untuk memberi pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua aktifitas yang merupakan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, maka hubungan antara *agent* dan *principal* menuntut adanya keterbukaan

serta kejelasan informasi agar proses pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan akuntabilitas dapat diwujudkan secara optimal dan mencerminkan transparansi (Silooy, 2023).

Repitamala *et al.* (2023) memberikan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas diantaranya yaitu:

1. Pengelolaan Laporan Keuangan
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan
3. Pengendalian Internal

Rahmiyati (2022), menyatakan ²⁶ akuntabilitas sektor publik tidak bisa terlepas dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik, ⁴⁶ akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan atau aktivitas, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan keuangan

pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Tanpa akuntabilitas, akan sulit bagi masyarakat untuk menilai apakah sumber daya publik telah dikelola dengan efektif dan efisien, atau apakah kebijakan yang diambil memang berpihak pada kepentingan publik. Oleh karena itu, akuntabilitas mendorong pihak yang berkuasa untuk tidak hanya melakukan tugas mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan keputusan mereka melalui proses yang transparan dan terukur (Andriana, 2024).

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Karianga (2023), dalam bukunya mengemukakan, pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan mengandung arti semua program pembangunan harus direncanakan dengan ketersediaan dana yang cukup, pelaksanaan anggaran bertujuan untuk mencapai visi, misi dan program pembangunan yang direncanakan, pertanggungjawaban mengandung arti pejabat pengelola keuangan harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan benar dan dapat diterima oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparaturnya daerah dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah dengan melakukan ⁵³ pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. ³⁵ Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, memperkuat pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kepada masyarakat, ⁶³ bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Rahmiyati, 2022).

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat dan pada intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Amalia, 2022).

⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai kelanjutan pemerintah untuk memperbaiki sistem keuangan pemerintah daerah, ² agar keuangan daerah dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat, serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang

diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Theresiana & Supriyadi, 2025).

Rahmiyati (2022), menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, prinsip pertanggung jawaban kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta pengawasan.
2. Transparansi, prinsip ini memiliki hak dan akses masyarakat dalam mengetahui informasi dan proses anggaran yang dilakukan aparatur daerah.
3. *Value for Money*, prinsip ini menggunakan tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

2.1.4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harus bisa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pada masyarakat dan DPRD mengenai kegagalan juga keberhasilannya sebagai bahan penilaian untuk tahun berikutnya. Masyarakat tidak saja sekedar berhak tau tentang pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah, namun juga berhak menuntut pertanggungjawaban terhadap penerapan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Silooy, 2023).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup pelaksanaan penganggaran dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan hukum, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketika ³³ unsur-unsur tersebut berjalan dengan baik, maka informasi keuangan yang disajikan menjadi lebih valid, relevan, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Tingkat akuntabilitas yang tinggi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip *good governance*, yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah (Saputri *et al.*, 2025).

⁶ Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. ⁸ Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Hal ini bertujuan agar setiap anggaran tidak dapat disalahgunakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena keuangan daerah yang tidak akuntabel dapat mengarah pada penyalahgunaan dana publik, korupsi, dan ketidakseimbangan fiskal yang merugikan masyarakat (Fauzziyah *et al.*, 2025).

Sejalan dengan Nagoro *et al.* (2024), yang menjelaskan ²⁶ pemerintah melakukan pertanggungjawaban atas laporan keuangan karena pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi yang besar dalam mengelola keuangan demi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

6

2.1.5. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

2

Asas umum pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas umum yang merupakan turunan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Rahmiyati (2022), menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, sebagaimana yang dijabarkan sebagai berikut:

41

41

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*),

akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jumlah adanya kepatuhan terhadap hukum, norma yang berlaku dan peraturan lain yang di syaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas proses terkait

dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, responsif, murah biaya, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2

3. Akuntabilitas program (*program accountability*), akuntabilitas program terkait

dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan manfaatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.

2.1.6. Laporan Keuangan

Mayasari *et al.* (2023), mendefinisikan laporan keuangan adalah catatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu entitas dan berisi informasi keuangan tentang suatu entitas untuk periode akuntansi. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dalam penelitian Ramadhan & Fahrani (2024), yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dikerjakan oleh

suatu entitas pelaporan selama periode pelaporannya. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, dengan menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu dalam menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan menjadi alat yang³⁸ digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas, untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk memperhatikan³⁶ informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Ramadhan & Fahrani, 2024).

Sesuai dengan² Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan daerah wajib menyajikan tujuh komponen laporan yang saling terkait:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih¹², menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos mengenai Saldo Anggaran Lebih¹⁴ (SAL).
3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Arus Kas¹⁶ (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

5. Laporan Operasional (LO), menyajikan pos-pos mengenai kegiatan operasional (pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit LO) suatu entitas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan perubahan ekuitas selama periode pelaporan.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam enam laporan utama, termasuk pula dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Laporan keuangan kelak menjamin kejelasan dan meningkatkan akuntabilitas. Laporan keuangan pemerintah wilayah disajikan dengan lebih efisien apabila implikasi peningkatan realisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin kuat, semua informasi terkait harus dimasukkan dalam laporan keuangan untuk menjamin akuntabilitas publik (Syahrifa *et al.*, 2025).

2.1.7. Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, penyajian laporan secara struktur tentang keuangan dan transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu instansi disebut sebagai penyajian laporan keuangan yang secara umum memiliki tujuan dalam memberi informasi tentang posisi keuangan entitas pelapor, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan yang dapat digunakan para pemakai membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya. Penyajian laporan keuangan dimaksudkan untuk

memberikan informasi penting mengenai kondisi keuangan entitas pelapor dan semua transaksinya dalam waktu pencatatan tertentu,.

⁴ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa tujuan PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Penyajian informasi yang utuh di dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Asmawanti *et al.*, 2022).

¹ Penyajian laporan keuangan sangatlah vital untuk dilakukan oleh entitas pelapor, karena merupakan sarana untuk memberikan kemudahan dalam menciptakan akuntabilitas publik adalah dengan menyampaikan laporan keuangan secara komprehensif, dengan demikian pemerintah daerah yang dipercaya untuk mengelola sumber daya keuangan yang ada harus bisa memberikan pertanggungjawaban publik melalui penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap, jujur dan tepat waktu (Silooy, 2023).

⁸ Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi yang akan mewujudkan akuntabilitas, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, dan ³ semua transaksi keuangan ²⁵ dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan dengan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Fauzziyah *et al.*, 2025).

Ardiana *et al.* (2024), menjelaskan laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Sedangkan andal adalah informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Selanjutnya dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan yang terakhir dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Penyajian laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting dalam pertanggung jawaban daerah. Pemerintah daerah yang bertindak sebagai pelayan masyarakat diharapkan bisa menyajikan dan menyampaikan informasi keuangan dengan baik. Penyajian yang dilakukan daerah harus sesuai dengan peraturan standar akuntansi yang berlaku dengan memperhatikan karakteristik kualitatif laporan keuangan. (Ardiana *et al.*, 2024).

Merujuk pada penelitian Silooy (2023), tujuan disajikannya laporan keuangan ialah untuk:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,
2. Menyediakan informasi mengenai kesamaan cara untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan *budget* yang telah ditentukan.

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang dipakai,
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan membiayai semua kegiatannya dan mencukupi keperluan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan terakut dengan sumber-sumber penerimaannya,
6. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelaporan.

2.1.8. Indikator Penyajian Laporan Keuangan

Fauzziyah *et al.* (2025), yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, dimana kualitas penyajian ini diukur dengan 4 indikator utama:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihitung dengan maksud penggunaannya.
2. Andal, yaitu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, dapat diverifikasi, serta menyajikan fakta secara jujur. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian pengguna.

2.1.9. Sistem Pengendalian Internal

³ Sistem Pengendalian Internal sebagai proses integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus. Sistem Pengendalian Intern akan efektif apabila dibangun ke dalam infrastruktur suatu instansi dengan menjadi bagian dari organisasi yang dikenal dengan istilah "*built-in*". Pengertian *built-in* adalah suatu proses yang terintegrasi dengan kegiatan, dan akan menyatu dengan pelaksanaan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan sampai evaluasi (Indriyani *et al.*, 2025).

Zai *et al.* (2024), menjelaskan pengendali internal adalah proses akuntansi dan audit yang digunakan di departemen keuangan yang memastikan integritas pelaporan keuangan ⁷ dan kepatuhan terhadap peraturan. Pengendalian internal membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan bahwa anggaran dipatuhi, kebijakan diikuti, kekurangan modal diidentifikasi, dan laporan akurat. ⁷ Sedangkan sistem pengendalian internal adalah serangkaian proses dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif, ³⁸ laporan keuangan akurat, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku, yang bertujuan untuk melindungi aset

organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan integritas informasi keuangan.

¹⁵ Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, ²⁸ Pada dasarnya, upaya untuk menciptakan dan meningkatkan sistem pengendalian internal merupakan salah satu cara dalam mencegah terjadinya kecurangan. Adanya sistem pengendalian internal yang optimal akan menjamin bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai peraturan aturan yang berlaku.

¹ Sejalan dengan penelitisn Silooy (2023), instansi pemerintah dituntut dan diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien, dalam upaya perwujudan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. Diperolehnya keyakinan yang memadai, bahwa dana yang dipercayakan kepada pemerintah telah dikelola dengan baik, diwujudkan dengan peningkatan dalam:

1. Efisiensi dan efektivitas yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan/program kerja pemerintah.
2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/program yang lebih tepat waktu kepada *shareholders* dan juga *stakeholders*.

3. ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan, diwujudkan melalui semakin menurun atau berkurangnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan anggaran belanja negara.

Dalam penelitian Saniya *et al.* (2025), tujuan utama pengendalian ini adalah agar pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik, efisien dan sesuai prosedur, dalam hal ini pemerintah daerah dapat menginformasikan laporan keuangan pemerintah daerah, dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas publik dan kesalahan dapat harus segera dideteksi dan diperbaiki. Fungsi pengendalian internal ini sendiri adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pemeriksaan efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan memperhatikan aspek efektivitas biaya, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan pengembangan teknologi dan implementasikan secara kompresif.

Sejalan dengan penelitian Rahayu *et al.* (2024), untuk memastikan tujuannya tercapai, manajemen dan karyawan harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang efisien. Akibatnya, ketika pemerintah daerah menerapkan sistem ini dengan baik, hasilnya adalah laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, ini disebabkan oleh fakta bahwa kekuatan sistem ini akan memastikan akurasi laporan keuangan.

2.1.10. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Muttaqien *et al.* (2024), yang didasari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, indikator Sistem Pengendalian Internal (SPI) merujuk pada elemen yang dapat

digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi. Indikator SPI yang umum diukur meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Berikut adalah penjelasan mengenai indikator tersebut:

- 5
1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal. Pimpinan dari suatu instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya.
2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*), yaitu kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian suatu resiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko.
3. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), informasi merupakan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik dan guna informasi tersampaikan secara tepat, lengkap, dan berkesinambungan.
- 17
4. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*), merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk

membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dari suatu instansi pemerintah dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu telah dilakukan untuk meminimalkan resiko dalam mencapai tujuan.

5. Pemantauan (*Monitoring*), merupakan suatu proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti, tidak hanya dilakukan secara berkala melalui kegiatan audit dan evaluasi, tetapi juga dapat dilakukan secara terus-menerus dalam kegiatan operasional sehari-hari guna mendeteksi secara dini adanya penyimpangan, kesalahan, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan dan landasan empiris dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Indetitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Revi Wilhemina Silooy (2023)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon)	Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis Regresi Linier berganda	Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal berpengaruh

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Indetitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
		¹ Jurnal Akuntansi Vol.9, No 2, Desember 2023, Hal 72-90 P-ISSN: 2656-3649 ⁴		⁷ signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
²	Mayang Syahrifa, Febryandhie Ananda, Dewi Zulvia (2025)	Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah <i>Journal of Management and Business</i> Vol. 3 (1), E-ISSN: 3025-0471	²¹ Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Analisi regresi linier berganda	Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3.	Fernanda Alivia Defana, ⁸ Rahayu (2023)	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021) Jurnal Ekombis, ²⁸ l. 11 No. 1 ISSN: 2338-8412 e-ISSN : 2716-4411	² Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Analisi regresi linier berganda menggunakan software IMB SPSS versi 25	²⁸ Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Indetitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
4.	Fauzan Ari Yunus, Abdul Hadi, Sirat Hartaty Hadady (2025)	10 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Vol 6 No 5 (2025) 1588-1607 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490	5 Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Analisi regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS versi 26	26 Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
5.	Titin Eka Ardiana, Nanang Cendrion, Diana Pramudya Wardhani (2024)	26 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo) Edunomika-Vol. 08, No. 04, 2024	26 Penyajian Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Metode sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan analisis data menggunakan SmartPls 4.0 .	Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
6	Yelfa Fauziyyah, Ria Nellly Sari, Lila Aggraini (2025)	Peran Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Pada Peningkatan Akuntabilitas	Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal,	Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara parsial

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Indetitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
		Pengelolaan Keuangan Daerah. <i>Economic, Accounting, Management and Business</i> Vol. 8, No. 3, July 2025 p-ISSN 2615-3009 27 ISSN 2621-3389	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 12 Analisis Data Regresi Linear Berganda Dengan Menggunakan SPSS Versi 26. 27	11 dan simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten indragiri hilir 9
7	Alim Ashari Muttaqien, Jamaluddn Majid, Nur Rahma Sari (2024)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating <i>Indonesian Journal of Taxation and Accounting</i> E-ISSN: 2988-6422 51 ISSN: 2988-4896	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah IBM SPSS 21	Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
8	Panji Nagoro, Anissa Hakim Purwanti, Nur Laila Yuliani (2024)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi 2 Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis regresi linear berganda	Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

No	Nama Pengarang / Tahun	Judul dan Indetitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
		⁵¹ <i>Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology</i> ¹⁴ ISSN 2828-0725	¹⁴	²⁵
9	Muti'ah, Marsyaf, Bambang Subiyanto (2025)	<i>The Effect of Financial Statement Presentation, Public Transparency, and Internal Control Systems on Regional Financial Accountability.</i> IJRISS ISSN 2454-6186 Volume VIII	<i>Financial Statement Presentation, Public Transparency, Internal Control Systems on Regional Financial Accountability</i> ⁸¹ <i>Analysis technique uses multiple linear regression analysis with the help of the SPSS program</i> ¹⁴	<i>Financial Statement Presentation and the Internal Control System have a positive and significant effect on Regional Financial Accountability.</i>
10	Dewi Pudji Rahayu, Yanto, Emaridial Ulza, Renatha Rima Arian (2024)	<i>The Influence of Internal Control Systems, Regional Financial Accounting Systems, Financial Report Presence, And Accessibility of Financial Reports on The Accountability of Financial Management In Tangerang Selatan Government.</i>	<i>Internal Control Systems, Regional Financial Accounting Systems, Financial Report Presence, Accessibility of Financial Reports, Accountability of Financial.</i> <i>Descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis uses SPSS 26.</i>	<i>Regional Government of South Tangerang City's Financial Management Accountability is affected by the Internal Control System, the Regional Financial Accounting System, Financial Reports' Accessibility, and Financial Statement Presentation.</i>

Sumber: Diolah dari beberapa penelitian terdahulu (2022-2025)

17

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2022), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran akan mempermudah pemahaman dalam mencermati arah pembahasan dalam penelitian ini yang disertai dengan paradigma penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dan jelas antara keterkaitan variabel penelitian yang dilakukan.

1

Penyajian laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas keuangan pemerintah yang disajikan secara *full disclosure* (pengungkapan penuh) bermanfaat bagi semua pihak dalam mengambil keputusan sehingga hak-hak publik dapat terpenuhi yakni hak untuk mengetahui, hak untuk diberikan informasi dan hak untuk aspirasinya didengar. Jadi, apabila penyajian laporan keuangan mengungkapkan perbedaan anggaran dan realisasinya yang disertai dengan penjelasan penyebab ketercapaian dan ketidaktercapaian dari setiap anggaran yang sudah ditetapkan dinilai telah memenuhi unsur akuntabilitas (Silooy, 2023).

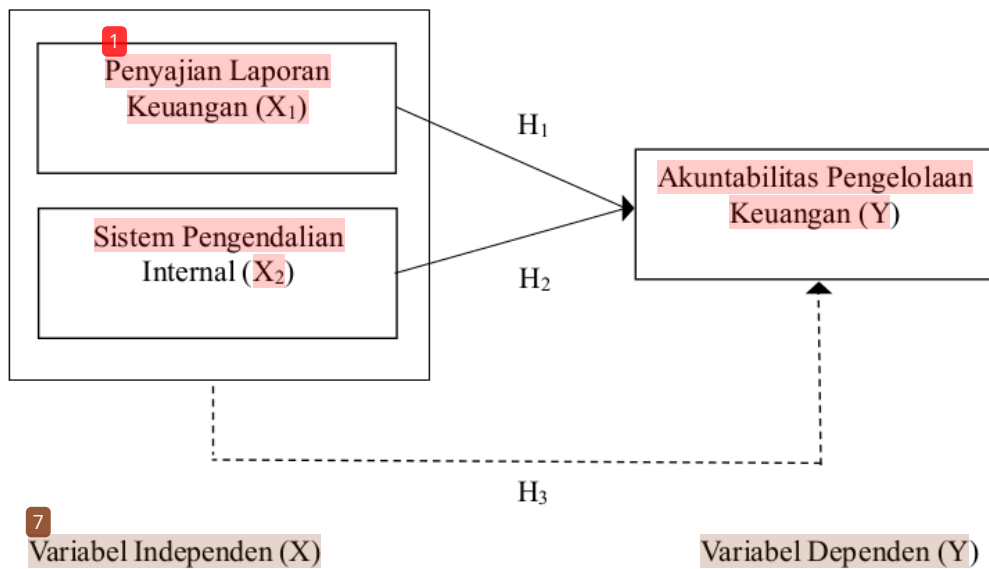
37

Dalam penelitian ini tidak hanya penyajian laporan keuangan yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian internal juga dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan. Setiap lembaga pemerintah sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang agar dapat meminimalkan risiko yang ada, sistem pengendalian internal ini sangat diperlukan didalam pemerintahan agar terhindar dari kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak-pihak didalam sebuah instansi pemerintahan tersebut (Muttaqien *et al.*, 2024).

25

Penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal penting untuk diteliti karena daerah Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya meningkatkan akuntabilitas daerah. Sehingga penelitian ini ingin melihat apakah benar penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran



Keterangan:

—————> Parsial

- - - - -> Simultan

2.4. Hipotesis

Sugiyono (2022), mendefinisikan hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis didefinisikan sebagai dugaan atau pernyataan sementara yang masih perlu diuji melalui penelitian lebih lanjut. Hipotesis berperan sebagai jawaban awal atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Keberadaannya tidak hanya membantu peneliti dalam memfokuskan studi, tetapi juga memungkinkan dilakukannya pengujian empiris untuk membuktikan hubungan atau pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan (Sijal, 2024).

Berdasarkan telaah teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka hipotesis berdasarkan penjabaran diatas, maka Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ : Diduga Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir
- H₂ : Diduga Sistem Pengendalian Intenal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir
- H₃ : Diduga Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugiyono (2018), menyatakan bahwa metode kuantitatif merupakan pendekatan yang memandang bahwa fenomena yang diteliti dapat diukur, yang bertujuan untuk meneliti sampel dan populasi khusus, penyatuan data dengan dukungan dari instrumen penelitian, analisis data dengan karakteristik statistik, bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena sesuai dengan rumusan masalah, mencari pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dan menguji hipotesis yang ingin dibuktikan. Rancangan penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Sugiyono (2022), menjelaskan bahwa angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada kantor-kantor OPD di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Dilihat dari waktu penelitian data penelitian ini berupa *cross section data* yaitu data yang diambil dalam kurun waktu tertentu yaitu selama kurang lebih 3 bulan. Waktu tersebut dihitung dari Desember 2025 sampai Februari 2026 yang mulai dari tahap *survey* tempat penelitian, proses perizinan, penyebaran kuesioner ke kantor OPD Kabupaten Indragiri Hilir dan pengolahan data.

32

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang akan diteliti. Dalam hal ini ⁴⁷ populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2022). Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi sektor publik yaitu ²² Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam penelitian kuantitatif, ⁷ sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2022). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah ¹⁶ *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tentu. Sampel ⁷⁷ dalam penelitian ini adalah OPD di Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 26 OPD yang merupakan badan/dinas sebagai sampel.

Tabel 3.1

² **Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Organisasi Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah
²⁴ 4	Dinas Pendidikan
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	¹⁴ Satuan Polisi Pamong Praja
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
19	Dinas Perikanan
20	Dinas Pertanian
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah
23	Badan Pendapatan Daerah
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kab.Inhil

Sebanyak 26 OPD diambil responden dengan pertimbangan atau kriteria

yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir selaku pengambil keputusan dalam menggunakan anggaran.
2. Kepala Subbagian Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Pegawai/Staf yang melaksanakan fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Pemegang Kas/Bendahara penerimaan maupun pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun pada bidang/posisi terkait.

3.4. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

² Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel independen 1 yaitu penyajian laporan keuangan variabel independen 2 yaitu sistem pengendalian internal, dan variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan.

3.4.1. Variabel Independen (X)

¹ 1. Penyajian Laporan Keuangan (X₁)

Penyajian laporan keuangan sangatlah vital untuk dilakukan oleh entitas pelapor, karena merupakan sarana untuk memberikan kemudahan dalam menciptakan akuntabilitas publik adalah dengan menyampaikan laporan keuangan secara komprehensif. Dengan demikian, pemerintah daerah yang dipercaya untuk mengelola sumber daya keuangan yang ada harus bisa memberikan pertanggungjawaban publik melalui penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap, jujur dan tepat waktu (Silooy, 2023). ³ Penyajian informasi yang utuh di dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Asmawanti *et al.*, 2022).

²² Dalam penelitian ini penyajian laporan keuangan diukur melalui ⁸⁴ empat indikator utama, yaitu:

2. Relevan
3. Andal
4. Dapat dibandingkan

5. Dapat dipahami

Adopsi kuesioner untuk variabel penyajian laporan keuangan ini mengacu pada penelitian Putri (2021) berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” Jumlah butir pertanyaan pada variabel ini sebanyak 8 item, dimana setiap indikator terdiri dari dua pernyataan yang disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran skala likert. Menurut Sugiyono (2022) skala likert adalah salah satu jenis skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang, atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Skala likert ini skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban.

14
Tabel 3.2
Skala Likert

Keterangan	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2022).

2. Sistem Pengendalian Internal (X₂)

Sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya diharapkan dapat menciptakan budaya pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan sehingga dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan terjadi penyimpangan.

Dalam penelitian ini sistem pengendalian internal diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Adopsi kuesioner untuk variabel sistem pengendalian internal ini mengacu pada Penelitian Pasaribu (2021). Jumlah butir pertanyaan pada variabel ini sebanyak 10 item, di mana setiap indikator terdiri dari 2 pernyataan yang disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran skala likert, untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2022).

Tabel 3.3
Skala Likert

Keterangan	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2022).

3.4.2. Variabel Dependen (Y)

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)

¹ Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harus bisa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pada masyarakat dan DPRD mengenai kegagalan juga keberhasilannya sebagai bahan penilaian untuk tahun berikutnya. Masyarakat tidak saja sekedar berhak tau tentang pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah, namun juga berhak menuntut pertanggungjawaban terhadap penerapan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Silooy, 2023).

⁶ Dalam penelitian ini akuntabilitas pengelolaan keuangan diukur dengan indikator sebagai berikut:

- ¹²
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
 2. Akuntabilitas proses
 3. Akuntabilitas program
 4. Akuntabilitas kebijakan

⁶ Adopsi kuesioner untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini mengacu pada penelitian Pasaribu (2021), ⁶ yang berjudul "Pengaruh Aksesibilitas Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada BPKA Kabupaten Deli Serdang" Jumlah butir pertanyaan pada variabel ini sebanyak 10 item pernyataan yang disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran ²⁹ *skala likert*. Menurut (Sugiyono, 2022), *skala likert* adalah salah satu jenis skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang, atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Skala *likert* ini skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban.

¹⁹
Tabel 3.4
Skala Likert

Keterangan	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2022).

⁷ 3.5. Prosuder dan Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan *survey* pengamatan secara langsung terhadap kondisi yang ada di lokasi penelitian (Ramadona *et al.*, 2023). ⁵⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini. Penyebaran kuesioner tersebut dilakukan sendiri oleh peneliti dengan tujuan agar tingkat pengembalian (*response rate*) kuesioner bisa lebih tinggi. Kemudian ¹⁶ dalam pengukurannya setiap responden diminta ¹⁶ pendapatnya mengenai suatu pertanyaan dengan skala penilaian dari 1 sampai 5 ²⁵ skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *skala likert*.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis ini meliputi pengolahan data, pengorganisasian data dan penemuan hasil. Dalam tahap-tahap analisa data yang digunakan untuk mengukur kebenaran dari hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Tahap-tahap pengujian dilakukan dengan perhitungan profil responden, distribusi jawaban responden, ¹² uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji Hipotesis (Sugiyono, 2022). Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 27.

3.6.1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2018), statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan jika ingin mendeskripsikan data sampel, namun tidak membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi. ⁷¹ Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang distribusi dan karakteristik sampel. Metode ini melibatkan pengamatan terhadap nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel independen dan dependen, serta menghitung rata-rata (mean), dan standar deviasi untuk melihat sejauh mana data tersebar dari nilai rata-ratanya. Dengan menggunakan statistik deskriptif, peneliti dapat memberikan informasi yang ringkas dan komprehensif tentang ⁶ data yang diamati dalam penelitian ini. Data yang digunakan berasal dari jawaban kuesioner responden dalam bentuk bobot skala likert.

⁶³ 3.6.2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui instrument penelitian valid (tepat sasaran) dan reliabel (konsisten). Validitas mengukur kemampuan instrument dalam

menggambarkan apa yang ingin diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran jika diuji ulang (Sugiyono, 2018). Uji kualitas data mencakup validitas (menilai akurasi alat ukur terhadap konsep yang diukur) dan reliabilitas (menilai konsistensi hasil pengukuran). Kedua uji ini penting untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan digunakan dalam penelitian. Uji kualitas data yang digunakan, yaitu:

3.6.2.1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur validnya suatu data. Valid berarti instrumen yang tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2018). Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak valid suatu kuesioner, untuk mengetahui apakah suatu item dikatakan valid tidak maka dilakukan perbandingan antara koefisien r_{hitung} dengan koefisien r_{tabel} . Untuk mengukur tingkat validitas suatu kuesioner adalah menggunakan $\alpha = 0,05$ (5%) dengan diketahui jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ kuesioner adalah tidak valid/gugur dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ kuesioner adalah valid/diterima.

3.6.2.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah jika hasil penelitian terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Reliabilitas adalah instrumen yang bisa digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji apakah hasil penelitian (kuesioner) dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan uji statistik, variabel yang reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ dan tidak reliabel jika memberikan nilai *Croanbach Alpha* $< 0,60$ (Sugiyono, 2018).

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan metode untuk menguji apakah model regresi linier bebas dari pelanggaran asumsi dasar, sehingga hubungan antara variabel independen dan dependen dapat diinterpretasikan dengan baik. Uji asumsi klasik penting untuk memastikan model regresi menghasilkan estimasi yang akurat dan dapat diandalkan dalam penelitian kuantitatif. Asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastitas (Ghozali, 2018).

3.6.3.1. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2018), uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti terdistribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk uji normalitas pada riset ini adalah analisis statistik dengan memakai *kolmogorov smirnov* dengan tingkat signifikan 0,05. Jika nilai signifikan (*p-value*) lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal, dan sebaliknya jika nilai signifikan (*p-value*) lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka dianggap tidak berdistribusi normal.

3.6.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2018).

3.6.3.3. Uji Heteroskedastitas

Menurut (Ghozali, 2018), uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan antara *variance* dari

residual pada model. Model regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung heteroskedastisitas karena terdapat data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar). Untuk mengetahui heteroskedastisitas, dapat dilihat melalui grafik *scatterplot* pada SPSS. Model yang bebas dari heteroskedastisitas akan memiliki pola titik-titik yang tersebar merata diatas dan dibawah sumbu Y atau tidak ada pola tertentu pada grafik *scatterplot*.

3.6.4. Uji Hipotesis

3.6.4.1. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan uji yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji regresi linier berganda mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan dengan tujuan memprediksi dan menganalisis hubungan antara variabel. Persamaan regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefesien Regresi

X_1 = Penyajian Laporan Keuangan

X_2 = Sistem Pengendalian Internal

ϵ = Error

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel penyajian laporan keuangan (X_1) dan sistem pengendalian internal (X_2) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

3.6.4.2. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji-t)

Menurut Ghozali (2018), uji statistik uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dasar pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan dalam uji-t adalah, jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.6.4.3. Uji Simultan (Uji-F)

Uji signifikan (Uji-F) merupakan uji yang digunakan untuk mengukur apakah sebuah variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara serentak atau bersama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan dalam uji F adalah, jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$, maka secara simultan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.6.4.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali (2018), koefisien determinasi merupakan uji yang menggambarkan presentase variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi, yang mengindikasikan seberapa baik model tersebut menjelaskan data. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi tinggi.

Menurut Sugiyono (2018), Koefisien Determinasi (*R-Squared*) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat. Nilai yang mendekati 1 dan menjauhi 0 berarti variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dan sebaliknya jika nilai mendekati 0 menjauhi 1 berarti kemampuan variabelvariabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2017¹⁶ adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sarana dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah dalam melakukan pelayanan publik dengan menggunakan dana dari APBN maupun APBD yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Berdasarkan undang-undangan Nomor 32 Tahun 2004, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari organisasi¹⁸ perangkat daerah provinsi dan kabupaten.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan bagian penting dari struktur pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan, sesuai kewenangan yang dimiliki daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian dari Provinsi Riau dibentuk berdasarkan undang-undangan Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, yang kemudian menjadi bagian dari Provinsi Riau.

Pada periode ini, Kabupaten Indragiri Hilir mulai menyusun kelembangaan OPD yang mengacu pada peraturan nasional dan kebutuhan daerah, dengan banyak dinas teknis yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Penyesuaian struktur OPD terbaru dilakukan berdasarkan: ³⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Melalui regulasi ini, struktur OPD mengalami penyederhanaan, penggabungan, serta pengklasifikasi berdasarkan berdasarkan tipologi urusan dan beban kerja. OPD terbagi menjadi: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas-dinas teknis (urusan wajib dan pilihan), Badan-badan daerah, Inspektorat, Kecamatan. Jumlah dan struktur OPD disesuaikan kembali berdasarkan evaluasi kebutuhan daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang menjalankan fungsi administrasi, pelayanan publik, dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kewenangannya masing masing berdasarkan ¹¹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki berbagai OPD yang mencakup dinas-dinas, badan, dan sekretariat daerah yang berperan dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks penelitian ini, OPD dijadikan sebagai unit analisis untuk mengkaji ¹⁸ pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal, terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemilihan OPD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai bagian dari institusi pemerintah daerah, OPD memegang peranan penting dalam ¹⁰ pengelolaan keuangan daerah, penyajian laporan keuangan dan pengendalian internal. Dengan demikian,

49

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh variabel independen terhadap dependen dalam ruang lingkup OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

40

Berdasarkan data dari Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, saat ini pada tahun 2026 jumlah dari OPD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 46 Unit OPD yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 26 Dinas/Instansi. Penelitian kemudian menggunakan 26 OPD yang merupakan dinas/instansi di Kabupaten Indragiri Hilir untuk diteliti dan menyebarkan 5 buah kuesioner untuk OPD yang mengizinkan penyebaran kuesioner penelitian ini. Berikut adalah tabel penyebaran kuesioner pada OPD di Kabupaten Indragiri Hilir.

24

Tabel 4.1

Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Kuesioner	
		Disebarkan	Kembali
1	Sekretaris Daerah	0	0
2	Sekretaris DPRD	0	0
3	Inspektorat Daerah	5	0
4	Dinas Pendidikan	5	1
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bercana	5	5
6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	5
7	Satuan Polisi Pamong Praja	5	5
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	5
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingkungan Anak	5	4
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5	5
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	0	0
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0

13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	5	5
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	0	0
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5	2
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan	0	0
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5	4
19	Dinas Perikanan	0	0
20	Dinas Pertanian	5	4
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5	5
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0
23	Badan Pandapatan Daerah	5	5
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5	5
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	4

Sumber : Data Lapangan, 2025.

Dari tabel 4.1 diatas 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat penyebaran kuesioner pada 16 OPD di Kabupaten Indragiri Hilir yang artinya 80 kuesioner telah disebar, terdapat 64 kuesioner kembali yang dapat diolah, sisanya terdapat 14 kuesioner yang tidak diisi dan 2 kuesioner tidak lengkap. Sedangkan, 10 OPD lainnya tidak membalas surat izin penelitian sehingga kuesioner tidak dapat disebar di instansi terkait. Adapun distribusi kuesioner yang telah disebar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Distribusi Kuesioner

Item	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dibagikan	80	100%
Kuesioner yang tidak diisi	14	17,5%
Kuesioner yang tidak lengkap	2	2,5%
Kuesioner yang dapat diolah	64	80%

Sumber: Data Lapangan, 2025.

Data ¹⁶ tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa penelitian telah menyebarkan sebanyak 80 kuesioner, dimana 14 kuesioner yang tidak di isi atau setara dengan 17,5% dan 2 kuesioner yang tidak lengkap 2,5%, Sedangkan, 64 kuesioner dapat dioleh yang berarti tingkat pengembalian dari kuesioner yang telah dibagikan sebesar 80%.

4.1.1. Karakteristik Responden

Penelitian ini ³² menggunakan data primer yang diperoleh dengan penyebaran angket atau kuesioner secara langsung kepada responden di 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi ¹¹ penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir dengan penyebaran kuesioner sebanyak 80 buah ke 16 ¹¹ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Hanya 64 kuesioner yang Kembali dan dapat memenuhi syarat untuk diolah. Berdasarkan hasil tersebut peneliti menggunakan data dari 64 kuesioner yang dapat diolah secara lengkap sebagai mana tersaji pada tabel domografi responden berikut ⁴⁶ ini:

Tabel 4. 3
Demografi Responden

Data	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	34	53,1%
Perempuan	30	46,9%
Jenjang Pendidikan		
SMA/SMK	9	14,1%
D3	4	6,3%
S1	39	60,9%
S2	12	18,8%
Latar Belakang Pendidikan		
Akuntansi	10	15,6%
Manajemen	19	29,7%

Ekonomi	6	9,4%
Hukum	6	9,4%
Teknik	1	1,6%
Lainnya>	22	34,4%
Jabatan		
Kepala OPD	5	7,8%
Kepala Bagian Keuangan	10	15,6%
Pegawai/Staf Keuangan	40	62,5%
Bendahara	8	12,5%
Sekretaris	1	1,6%
Lama Masa Jabatan		
1-5 Tahun	36	56,3%
> 5 Tahun	28	43,8%

Sumber: *Data Olahan*, 2026.

⁹ Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh ¹³ laki-laki sebanyak 34 orang dengan presentase sebesar 53,1%, sedangkan sisanya responden perempuan sejumlah 30 dengan presentase 46,9%. Jenjang pendidikan terbanyak ⁷⁵ responden yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir adalah jenjang pendidikan S1, yaitu sebanyak 39 orang atau setara dengan 60,9%, sedangkan S2 sejumlah 12 responden 18,8%, sisanya D3 sejumlah 4 orang setara 6,3% dan Pendidikan setingkat SMA berjumlah 9 orang dengan presentase ⁷ 14,1%. Latar belakang pendidikan dari akuntansi sebanyak 10 orang dengan presentase 15,6%, dari manajemen 19 orang setara 29,7%, ekonomi dan hukum sebanyak 6 orang setara 9,4%, Teknik 1 orang 1,6%, dan diluar dari itu sebanyak 22 orang setara 34,4%.

³³ Responden dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai/staf keuangan sebanyak 40 orang atau setara dengan 62,5%, dijabat lainya seperti kepala OPD sebanyak 5 orang dengan presentase 7,8%, kepala bagian keuangan 10 orang

15,6%, bendahara 8 orang 12,5%, dan sekretaris 1 orang atau setara 1,6%. Lalu mayoritas responden dalam penelitian ini telah bekerja selama 1-5 tahun sebanyak 36 orang atau setara dengan 56,3% dan yang telah berkerja lebh dari 5 tahun sebanyak 28 orang 43,8%, dimana pada masa ini OPD masih dikatakan masa produktif yang mengindikasikan tingginya nilai kinerja.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel statistik deskriptif dibawah ini memberikan gambaran mengenai nilai, mean, median, standar deviasi, variance, range, minimum dan maximum. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan aplikasi *Statistical Package for the Socialscences* (SPSS) versi 27. Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyajian Laporan Keuangan X1	64	30	40	35.31	2.911
Sistem Pengendalian Internal X2	64	33	50	43.42	3.602
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Y	64	36	50	44.41	3.685
Valid N (listwise)	64				

Sumber : Output SPSS 27 for Windows, 2026

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari 64 kuesioner yang telah diisi oleh responden dapat diketahui bahwa variabel X₁ yaitu penyajian laporan keuangan memiliki nilai minimum 30, nilai maksimum 40, rata-rata sebesar 35,31 dengan nilai standar deviation 2,911. Variabel X₂ yaitu sistem pengendalian internal

memiliki nilai minimum 33, nilai maksimum 50, nilai rata-rata 43,42 dengan standar deviation 3,602. Variabel Y yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai minimum 36, nilai maksimum 50, nilai-nilai 44,41 dengan standar deviation 3,685. Berdasarkan table 4.4 dapat disimpulkan bahwa 634 sampel setiap variabel pada penelitian ini telah memenuhi standar normal, hal ini diketahui berdasarkan nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkn nilai rata-rata sehingga data dinyatakan normal.

4.2.2. Uji Kualitas Data

4.2.2.1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid dan menguji konsistensi butir-butir pertanyaan sehingga dapat menggambarkan indikator yang diteliti. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara satu faktor dengan skor total. Pengukuran validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5 hingga table 4.7 berikut:

a. Penyajian Laporan Keuangan (X_1)

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan

Item Pertanyaan	rhitung	rtabel	keterangan
1	0,809	0,2461	Valid
2	0,729	0,2461	Valid
3	0,703	0,2461	Valid
4	0,690	0,2461	Valid
5	0,699	0,2461	Valid
6	0,704	0,2461	Valid
7	0,570	0,2461	Valid
8	0,664	0,2461	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2026.

Berdasarkan table 4.5 diatas, hasil uji validitas pada variabel independen yaitu, penyajian laporan keuangan yang menunjukkan nilai *pearson correlation* (r_{hitung}) untuk setiap pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} dengan menggunakan rumus $df=n-2$ untuk nilai $df=64-2=62$, dengan nilai alpha (Tingkat kesalahan) 0,05 atau 5% diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,2461. Hal ini menandakan bahwa dalam 8 butir pertanyaan kuesioner yang disebarkan digunakan dalam mengukur masing-masing variabel penyajian laporan keuangan dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,2461) Adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

b. Sistem Pengendalian Internal (X2)

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,462	0,2461	Valid
2	0,585	0,2461	Valid
3	0,729	0,2461	Valid
4	0,640	0,2461	Valid
5	0,650	0,2461	Valid
6	0,584	0,2461	Valid
7	0,590	0,2461	Valid
8	0,740	0,2461	Valid
9	0,772	0,2461	Valid
10	0,681	0,2461	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2026.

Berdasarkan table 4.6 diatas, hasil uji validitas pada variabel sistem pengendalian internal yang menunjukkan nilai *pearson correlation* (r_{hitung}) untuk setiap pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} dengan menggunakan rumus $df=n-2$ untuk nilai $df=64-2=62$, dengan nilai alpha (tingkat kesalahan) 0,05 atau 5% diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,2461. Hal ini menandakan bahwa dalam 10 butir

pertanyaan kuesioner yang disebarkan digunakan dalam mengukur masing-masing variabel penyajian laporan keuangan dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,2461) adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Item	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1		0,722	0,2461	Valid
2		0,671	0,2461	Valid
3		0,631	0,2461	Valid
4		0,711	0,2461	Valid
5		0,614	0,2461	Valid
6		0,638	0,2461	Valid
7		0,582	0,2461	Valid
8		0,716	0,2461	Valid
9		0,706	0,2461	Valid
10		0,665	0,2461	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2026.

Berdasarkan table 4.7 diatas, hasil uji validitas pada variabel dependen, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menunjukkan nilai *pearson correlation* (r_{hitung}) untuk setiap pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} dengan menggunakan rumus $df = n - 2$ untuk nilai $df = 64 - 2 = 62$, dengan nilai α (tingkat kesalahan) 0,05 atau 5% diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,2461. Hal ini menandakan bahwa dalam 10 butir pertanyaan kuesioner yang disebarkan digunakan dalam mengukur masing-masing variabel penyajian laporan keuangan dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,2461) adalah valid dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

4.2.2.2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji apakah hasil penelitian (kuesioner) dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan uji statistik, variabel yang

66 reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 dan tidak reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* < 0,60. 19

1 **Tabel 4.8**
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Standard	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X_1)	0,848	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X_2)	0,844	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,860	0,60	Reliabel

Sumber: Data olahan SPSS Versi 27, 2026.

Pada table 4.8 menunjukkan nilai *cronbach's alpha* terhadap variabel independen, 5 penyajian laporan keuangan 0,848 dan sistem pengendalian internal 0,844, terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,860. Keempat variabel reliabel karena memiliki nilai > 0,60.

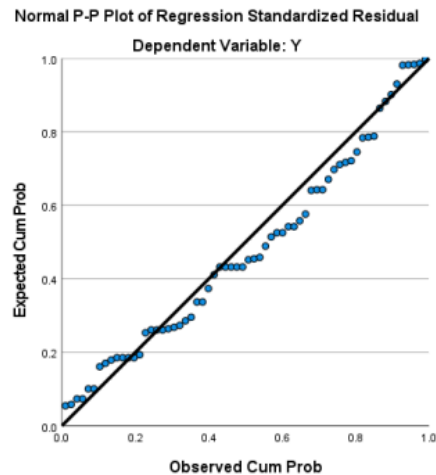
56 4.2.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedasitas.

52 4.2.3.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal data mendekati normal. Dalam pengujian normalitas penelitian uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik yaitu *Normal Probability Plots* dan grafik histogram dan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Data normal menurut uji probability plot adalah jika hasil pengujian data ata didapat titik-titik menyebar sepanjang garis diagonal. Berikut gambar grafik chart normal P-P Plot pada hasil uji normalitas 41 dapat dilihat pada gambar 2 dibawah.

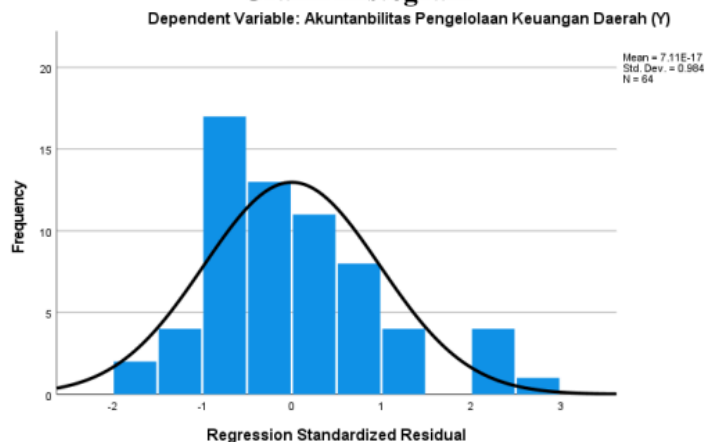
Gambar 2
Normal P-Plot



Sumber: Olahan Data SPSS Versi 27, 2026

Berdasarkan gambar 1 hasil uji normalitas dapat dilihat grafik chart *Normal Probability Plot* (P-P Plot) menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar dan mengikuti arah garis diagonal, menunjukkan distribusi data penelitian adalah normal.

Gambar 3
Grafik Histogram



Sumber: Olahan Data SPSS Versi 27, 2026

Grafik histogram pada gambar 3 menunjukkan grafik histogram yang memberikan distribusi yang mendekati normal dan membentuk pola yang

mendekati kurva normal (*bell-shaped*), meskipun tidak sepenuhnya simetris. *Kolmogorov-Smirnov* juga menunjukkan hasil bahwa data terdistribusi secara normal seperti pada tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.88005914
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.098
	Negative	-.063
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.128
	99% Confidence Interval	Lower Bound .120
		Upper Bound .137

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2026.

Pada tabel 4.9 berdasarkan hasil uji normalitas *Kolmogorov smirnov* nilai signifikansi 0,200 > 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal, artinya data variabel dalam pengujian model regresi terdistribusi secara normal, maka model penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik normalitas.

4.2.3.2. Uji Multikolonieritas

Mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas digunakan *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF dibawah 10 dan *Tolerance Value* diatas 0,10 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas dan jika nilai VIF diatas 10 dan *Tolerance Value* dibawah 0,10 maka terdapat gejala multikolinieritas.

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolenearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penyajian Laporan Keuangan	.767	1.303
	Sistem Pengendalian Internal	.767	1.303

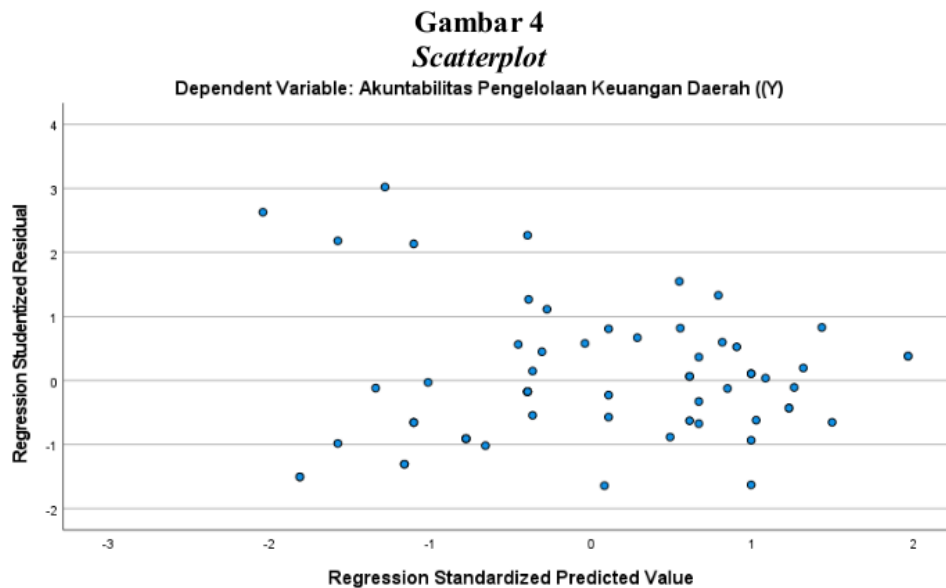
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Output SPSS 27 for Windows, 2026.

Berdasarkan hasil uji tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 yaitu partisipasi penyajian laporan keuangan sebesar 0,767 dan sistem pengendalian internal 0,767. Untuk nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari masing-masing variabel lebih kecil dari 10, yaitu penyajian laporan keuangan sebesar 1,303 dan sistem pengendalian internal sebesar 1,303. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat korelasi antara variabel bebas sehingga model regresi dikatakan bebas dari multikolenearitas.

4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji *scatter plot* jika didapat titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola maka disimpulkan tidak terjadi kesamaan *variance residual* dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Output SPSS 27 for Windows, 2026.

Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat *scatterplot* antara regresi standar residual (Sumbu Y) dan regresi standar prediksi *value* (sumbu X) dapat dilihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal tersebut menandakan bahwan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, sehingga dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.

4.2.4. Uji Hipotesis

4.2.4.1. Uji Regresi Linier Berganda

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut data hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.657	5.193		2.630	.011
	Penyajian Laporan Keuangan (X1)	.205	.145	.162	1.417	.162
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	.542	.117	.529	4.635	<.001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2026

Dari data table 4.11 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda:

$$Y = 13,657 + 0,205 X_1 + 0,542 X_2 + \epsilon$$

Dalam persamaan diatas diketahui:

1. Nilai konstanta sebesar 13,657 menunjukkan arti bahwa apabila nilai Penyajian Laporan Keuangan (X₁) dan Sistem Pengendalian Internal (X₂) berniali 0, maka nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 13,657 satuan.
2. Variabel Penyajian Laporan Keuangan (X₁) mempunyai koefisien sebesar 0,205 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen Penyajian Laporan Keuangan (X₁) menyebabkan kenaikan pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,205 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
3. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X₂) mempunyai koefisien sebesar 0,542 dan bertanda positif. Hal ini berarti setiap kenaikan satu persen Sistem Pengendalian Internal (X₂) menyebabkan kenaikan pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,542 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

4.2.4.2. Uji Parsial (Uji-t)

Penerimaan dan penolakan Hipotesis dilakukan dengan kriteria jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka Hipotesis diterima. Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Menemukan nilai t_{tabel} ditentukan dengan tingkat signifikansi (α) 5% (0,05) maka (0,05/2) dengan derajat kebebasan $df (n-k) = (64-3)$ adalah 61. Berikut hasil uji parsial (Uji-t) dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial (Uji-t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.657	5.193		2.630	.011
	Penyajian Laporan Keuangan (X1)	.205	.145	.162	1.417	.162
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	.542	.117	.529	4.635	<.001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2026.

Berdasarkan tabel 4.12 diatas menunjukkan hasil uji parsial (Uji-t) dapat dilihat $n=64$, $df (n-k) = (64-3)$ adalah 61 mempunyai t_{tabel} 1,99962 bahwa:

1. Variabel penyajian laporan keuangan (X_1) memiliki t_{hitung} 1,417 sedangkan, t_{tabel} 1,99962. Sehingga, $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,417 < 1,99962$) dengan signifikansi untuk variabel penyajian laporan keuangan (X_1) adalah 0,162 yang artinya > dari taraf signifikan 0,05 maka H_1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
2. Variabel sistem pengendalian internal (X_2) memiliki t_{hitung} 4,635 sedangkan, t_{tabel} 1,99962. Sehingga, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,635 > 1,99962$) dengan signifikansi untuk

variabel sistem pengendalian internal (X_2) adalah 0,001 yang artinya < dari taraf signifikan 0,05 maka H_2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

4.2.4.3. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi < 0,05, maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai signifikansi > 0,05, maka secara simultan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji simultan (Uji-F) dapat dilihat pada tabel 4.13:

Tabel 4.13
Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	332.869	2	166.434	19.428	<,001 ^b
	Residual	522.569	61	8.567		
	Total	855.437	63			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (X_2), Penyajian Laporan Keuangan (X_1)

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2026. 2,74

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat diketahui hasil anova (*analysis of variance*) atau uji-f menunjukkan hasil nilai F_{hitung} sebesar 19,428 lebih besar dari $F_{tabel} = 3,15$ dengan pembilang df pembilang= $k-1 = 3-1 = 2$, df penyebut = $n-k = 64-3 = 61$ dan taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Dapat dilihat juga bahwa tingkat signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian

internal, secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir yang artinya H_3 diterima.

4.2.4.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Penelitian yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas, biasanya digunakan *Adjusted R Square*, yaitu nilai R^2 yang sudah disesuaikan agar tidak menimbulkan bias akibat penambahan jumlah variabel bebas. Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variabilitas dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Hasil uji koefisien determinasi bisa dilihat pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.624 ^a	.389	.369	2.92689

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (X2), Penyajian Laporan Keuangan (X1)

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2026.

Dari table 4.14 diatas menunjukkan hasil bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,369 artinya bahwa terdapat sebanyak 36,9% pengaruh variabel Y, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah OPD Kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Sedangkan, sisanya 63,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau diteliti dalam penelitian ini.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan (X₁) Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh secara statistik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, terlihat berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar 1,417 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.99962, yang artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$, dengan signifikansi 0.162 lebih besar dari taraf signifikansi 0.05 sehingga H_1 ditolak.

Temuan ini mengindikasikan bahwa baik atau buruknya penyajian laporan keuangan belum tentu dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunus *et al.* (2025), yang mengemukakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Silooy (2023), yang menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai t_{hitung} sebesar 6.216 dan nilai t_{tabel} 1.978, yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig. 0,000 < 0,05.

Penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan karakteristik kualitatif akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena

memastikan transaksi keuangan disajikan dengan lengkap dan sesuai peraturan. Dalam teori keagenan, pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban menyajikan laporan keuangan yang akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai prinsipal.

Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan yang baik menjadi faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas, terutama karena kewajiban pemerintah daerah maupun pusat dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel. Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan serta akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin baik penyajian laporan keuangan, maka seharusnya semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang dihasilkan.

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, tidak berpengaruhnya penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mengindikasikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam menilai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan laporan keuangan belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas, melainkan cenderung masih dipandang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir, penyajian laporan keuangan belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4.3.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X₂) Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan nilai t_{hitung} 4,635 sedangkan, t_{tabel} 1,99962. Sehingga, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,635 > 1,99962$) dengan signifikansi untuk variabel sistem pengendalian internal (X₂) adalah 0,001 yang artinya $<$ dari taraf signifikan 0,05, maka H₂ diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Defana & Rahayu (2023), dengan demikian hasil dari penelitian ini semakin memperkuat penelitian Muttaqien *et al.* (2024), Silooy (2023), Yunus *et al.* (2025), Nagoro *et al.* (2024), dan Muti'ah *et al.* (2025) yang juga menyimpulkan hal yang sama yakni akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern secara signifikan. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Defana & Rahayu (2023), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai sig. $0,087 > 0,05$.

Penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif sangat berperan penting dalam mengurangi risiko adanya kekeliruan maupun kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penyajiann lapoan keuangan sehingga nantinya

mampu menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sebagai perwujudan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dikatakan demikian, karena salah satu cara yang tepat dan relevan untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu instansi serta memiliki peran krusial dalam usaha untuk mencegah, mendeteksi *fraud*, mengurangi penyimpangan dalam pelayanan publik dan memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan adalah dengan menerapkan sistem pengendalian internal.

Diterimanya hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan teori keagenan. Dalam perspektif teori ini, pemerintah daerah sebagai agen memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat sebagai principal. Adanya potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi mendorong perlunya mekanisme pengawasan, salah satunya melalui sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik mampu meminimalkan penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana dibuktikan dalam hasil penelitian ini yang telah berhasil menunjukkan pentingnya peran pengendalian internal dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

4.3.3. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan (X_1) dan Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X_2) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis secara simultan, penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga H_3 diterima. Hal ini dilihat dari nilai F_{hitung} sebesar 19,428, sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 3,15 dengan taraf signifikansi 0.05 sehingga F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan signifikansi 0.001 lebih kecil dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang artinya H_3 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian, Fauzziyah *et al.* (2025), yang mewakili variabel independen penyajian laporan keuangan, Muttaqien *et al.* (2024), yang mewakili variabel independen sistem pengendalian internal. Dua peneliti di atas mengemukakan penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak hanya ditentukan oleh satu aspek saja, melainkan merupakan hasil dari sinergi antara penyajian laporan keuangan dan pengaruh sistem pengendalian internal yang

memadai. Saling melengkapi dalam memastikan bahwa proses pencatatan dan pengolahan informasi keuangan dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang sudah ditentukan dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, serta sistem pengendalian internal dapat tercapai secara efektif, laporan keuangan akurat, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memerlukan perbaikan dan penguatan secara menyeluruh terhadap kedua faktor tersebut agar semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara pihak *principal* (masyarakat) dan *agent* (pemerintah daerah), di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Penyajian laporan keuangan yang baik berfungsi sebagai media informasi untuk mengurangi asimetri informasi antara agent dan principal, sementara sistem pengendalian internal berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalkan potensi penyimpangan.

Dengan demikian, kombinasi keduanya mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga sesuai dengan prinsip dasar teori keagenan yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban, pengendalian dan akuntabilitas dalam hubungan keagenan.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, terlihat berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar $1,417 < \text{nilai } t_{tabel} \text{ sebesar } 1,99962$, dengan signifikansi $0,162 > 0,05$ sehingga H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan yang ada belum mampu meningkatkan akuntabilitas secara langsung.
2. Berdasarkan hasil penelitian sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, nilai t_{hitung} $4,635 > t_{tabel} 1,99962$. dengan signifikansi $0,001 < \text{dari taraf signifikan } 0,05$, maka H_2 diterima. mengindikasikan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

35 3. Berdasarkan hasil penelitian 5 penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dari nilai F_{hitung} sebesar 19,428 > nilai F_{tabel} sebesar 3,15 dan signifikansi 0.001 < dari 0.05, maka H_3 diterima. 6

88 Disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah lebih dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian internal, namun tetap memerlukan dukungan dari penyajian laporan keuangan yang baik agar 8 dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan.

5.2. Saran

1 Berikut dapat diajukan beberapa saran setelah dilakukannya penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan refleksi bagi penulis sebagai calon pekerja dan pengusaha untuk dapat memecahkan masalah pendidikan, khususnya terkait dengan memiliki akuntabilitas dalam 48 penyajian laporan keuangan, pengendalian sistem internal dalam pengelolaan keuangan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

1 Dapat dilihat dalam penelitian ini nilai *Adjust R-Square* yang dihasilkan hanya sebesar 36,9% yang berarti bahwa masih terdapat banyak variabel independen lain yang tidak menutup kemungkinan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada 8 Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga diharapkan dapat memperluas variabel yang tidak diuji dan diteliti dalam penelitian ini. Teknik wawancara dapat dipergunakan pada penelitian selanjutnya sehingga dapat menghasilkan hasil yang mungkin saja berbeda. Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti dilingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya selain daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Bagi Pemerintah

Dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan, masukan dan evaluasi untuk mengembangkan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah untuk seluruh badan dan dinas yang ada di pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai bahan mengambil kebijaksanaan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan hendaknya lebih mempertimbangkan lagi penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal melalui berbagai program dan peraturan tentang standar pengelolaan laporan keuangan, diharapkan seluruh pegawai dapat terus mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

4. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai referensi tambahan di perpustakaan.

ORIGINALITY REPORT

50%

SIMILARITY INDEX

43%

INTERNET SOURCES

39%

PUBLICATIONS

28%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Revy Wilhelmina Silooy. "PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon)", Jurnal Akuntansi, 2023 Publication	7%
2	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	3%
3	repository.unpas.ac.id Internet Source	3%
4	jurnal.widyagama.ac.id Internet Source	2%
5	ojs.unpkediri.ac.id Internet Source	2%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
8	journal.unpas.ac.id Internet Source	2%
9	positori.usu.ac.id Internet Source	1%
10	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
11	ejurnal-unespadang.ac.id Internet Source	1%
12	eprints.unpak.ac.id Internet Source	1%
13	repository-feb.unpak.ac.id Internet Source	1%
14	Submitted to Universitas Jambi	

15	repository.ekuitas.ac.id Internet Source	1 %
16	lib.ibs.ac.id Internet Source	1 %
17	eprints.polsri.ac.id Internet Source	1 %
18	ejournal.unhi.ac.id Internet Source	1 %
19	eprints.pancabudi.ac.id Internet Source	1 %
20	eprints.umk.ac.id Internet Source	1 %
21	123dok.com Internet Source	1 %
22	eprints.uny.ac.id Internet Source	1 %
23	Submitted to Universitas Khairun Student Paper	1 %
24	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
25	repository.stienobel-indonesia.ac.id Internet Source	1 %
26	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
27	repository.umpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
28	jurnal.unived.ac.id Internet Source	<1 %
29	repo.stie-pembangunan.ac.id Internet Source	<1 %
30	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	<1 %

31	Siti Pratiwi Husain, Iwan S. Seber, Valentina Monoarfa. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", Jambura Accounting Review, 2023 Publication	<1 %
32	repository.upiypk.ac.id Internet Source	<1 %
33	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to Universitas Tadulako Student Paper	<1 %
35	Norhadijah Norhadijah, Sri Yuni, Ferry Christian. "PENGARUH IMPLEMENTASI TRANAKSI NON TUNAI, AKUNTABILITAS, DAN KEBIJAKAN LEGAL SISTEM INFORMASI TERHADAP PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan)", Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan, 2023 Publication	<1 %
36	Submitted to Universitas Papua Student Paper	<1 %
37	current.ejournal.unri.ac.id Internet Source	<1 %
38	Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh. "PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Publication	<1 %
39	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
40	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Tengah Student Paper	<1 %
41	ejournal.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
42	Submitted to General Sir John Kotelawala Defence University Student Paper	<1 %
43	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	<1 %
44	www.neliti.com Internet Source	<1 %

45	Vania Annissa Holle, Agustinus Salle, Mariolin Sanggenafa. "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua)", JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020 Publication	<1 %
46	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
47	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
48	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
49	Rizkiyah Lestari Utami, Yudi -, Misni Erwati. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo", Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, 2023 Publication	<1 %
50	Siska Vadila, Taufeni Taufik, Yesi Herawati. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir", Owner, 2026 Publication	<1 %
51	Panji Nagoro, Anissa Hakim Purwantini, Nur Laila Yuliani. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah", UMMagelang Conference Series, 2024 Publication	<1 %
52	Magdalena Nona Ice, Lilis Ardiani, Kurnia Kurnia. "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi", Owner, 2023 Publication	<1 %
53	Ruth Sarlota Chlasina Anasanay, Adolf Z. D. Siahay, Hesty T. Salle. "Pengaruh Faktor Karakteristik Pemerintah Daerah, dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026 Publication	<1 %
54	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
55	docplayer.info Internet Source	<1 %

56	Dwince Oktasari, Saiful Saiful, Nila Aprila. "EKSPLOKASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS INFORMASI PENGGUNAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU", JURNAL FAIRNESS, 2021 Publication	<1 %
57	Hengky Orlanda, Muhammad Gowon, Misni Erwati. "PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA DINAS-DINAS DI PROVINSI JAMBI)", Jambi Accounting Review (JAR), 2021 Publication	<1 %
58	Nasrun Naida. "Optimalisasi SIPD dan SPIP dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan: Pentingnya Kompetensi SDM", Solusi, 2024 Publication	<1 %
59	Siti Azizah Sania, Abu Nizarudin, Wenni Anggita. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anaggaran Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Kantor Desa (Studi Empiris Desa Lubuk Lingku Kecamatan Lubuk Besar)", Indonesian Journal of Accounting and Business, 2024 Publication	<1 %
60	Ninda Riskia Putri, Agustiawan Agustiawan. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kabupaten Kampar)", Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal, 2020 Publication	<1 %
61	Janitra Yoga Indratama, Agung Praptapa, Agus Sunarmo. SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business, 2018 Publication	<1 %
62	ejurnal.undana.ac.id Internet Source	<1 %
63	Goodwill Desember 2013. "Goodwill Vo. 4 No. 2 Desember 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2014 Publication	<1 %
64	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	<1 %
65	media.neliti.com Internet Source	<1 %
66	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
67	Evi Hidayakh, Sri Rahayu, Muhammad Gowon. "Determinan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi)", Jurnal Akuntansi	<1 %

-
- | | | |
|----|---|------|
| 68 | repository.unj.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 69 | Anik Wuriasih. "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari)", Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2019
<small>Publication</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 70 | Submitted to Indiana University
<small>Student Paper</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 71 | Ni Made Indah Purwitasari, Ni Putu Yuria Mendra, Desak Ayu Sriary Bhegawati. "Stock PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2016-2018", Widya Akuntansi dan Keuangan, 2021
<small>Publication</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 72 | Devi Lusiyana, Arik Susbiyani, Didik Eko. "Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan", BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting, 2020
<small>Publication</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 73 | Yohanes Suhardjo. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA SEMARANG)", Solusi, 2019
<small>Publication</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 74 | itbsemarang.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 75 | repo.darmajaya.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 76 | Ni Kadek Sri Dewi Asih, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi. "PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA), SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA OPD KABUPATEN GIANYAR", Hita Akuntansi dan Keuangan, 2021
<small>Publication</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 77 | Harry Aprsiansyah, Sri Rahayu, Misni Erwati. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo", Jambi Accounting Review (JAR), 2020 | <1 % |
|----|--|------|

- | | | |
|----|---|------|
| 78 | Submitted to Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang
Student Paper | <1 % |
| 79 | Submitted to Trisakti University
Student Paper | <1 % |
| 80 | etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 81 | journal.iainkudus.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 82 | journal.ikopin.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 83 | Anggie Rizka S, Zamzami Zamzami, Muhammad Gowon. "PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KESUKSESAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2021
Publication | <1 % |
| 84 | Fiane Rina Sambuaga. "PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI", KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah), 2020
Publication | <1 % |
| 85 | Helda Arta Melvia, Detak Prapanca, Vera Firdaus. "Pentingnya Penguatan Kinerja Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan System Informasi Untuk Menilai Kualitas Laporan Keuangan", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2026
Publication | <1 % |
| 86 | I Wayan Juniarta, Gde Herry Sugiarto Asana. "PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR", Journal Research of Accounting (JARAC), 2020
Publication | <1 % |
| 87 | Lynda L, Meinarni Asnawi, Bill J. C. Pangayow. "PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA), KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH", Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset, 2019
Publication | <1 % |

88	Ria Herlina, Taufeni Taufik, Azwir Nasir. "Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2021 Publication	<1 %
89	Submitted to Southeast Community College Student Paper	<1 %
90	Journal Full. "Goodwill Vol. 5 No. 2 Desember 2014", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2014 Publication	<1 %
91	Narapati Abharina Kibran Niode, Muhammad Yusuf. "Masalah Akuntabilitas Publik Pada Organisasi Pemerintah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tegal)", JURNAL FAIRNESS, 2022 Publication	<1 %
92	Nining Asniar Ridzal, I Wayan Sujana, Ernawati Malik. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan", Owner, 2022 Publication	<1 %
93	Ratna Purnama Sari, Citra Setia Mulyani, Dekeng Setyo Budiarto. "PENTINGNYA PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH", Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 2020 Publication	<1 %
94	Taufan Maulamin, Agus Cholik, Eneng Tuti Alawiah. "PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PADA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)", Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2019 Publication	<1 %
95	Winston - Pontoh. "Goodwill No. 1 Vol. 4 Juni 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2013 Publication	<1 %
96	anzdoc.com Internet Source	<1 %
97	Ana Khoirina, Widaryanti Widaryanti. "Analisis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada	<1 %

-
- 98 Tathya Pradipta, R Budi Hendaris. "PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2025 <1 %
Publication
-
- 99 Gunung Hasian Siahaan, Syaikhul Fallah, B. Elitha Bharanti. "PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN KOMITMEN PIMPINAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SKPD DI KABUPATEN KEEROM", Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset, 2018 <1 %
Publication
-
- 100 Jefri Imbiri, Siti Rofingatun, Bill J. C. Pangayow. "PENGARUH INVENTARISASI, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN ASET TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH", Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset, 2018 <1 %
Publication
-
- 101 Lucy Auditya, Husaini Husaini, Lismawati Lismawati. "ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH", JURNAL FAIRNESS, 2021 <1 %
Publication
-
- 102 Siti Nur Aisah, Nova Abriano, Nurfadila Dwi Hidayati. "PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI STAF AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN", JEPP : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata, 2022 <1 %
Publication
-
- 103 Suci - Atiningsih. "THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY UTILIZATION ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENTS AS MODERATION VARIABLES", ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 2020 <1 %
Publication
-
- 104 digilib.uinsby.ac.id <1 %
Internet Source
-